



e-ISSN3032-601X & p-ISSN3032-7105

Vol. 1, No. 2, Tahun 2024

# MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

# Journal of MISTER

Vol. 1, No. 2, 2024

Pages: 169–178

## Analisis Rekontruksi Fungsi Manajemen Publik dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Banten

Riska Amelia, Eli Apud Saepudin, Enong Ais Hikmatulaila, Agas,  
Syendy Ardiansyah, Husnul Khotimah

Prodi Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia

### Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1298>

### How to Cite this Article

APA : Amelia, R., Saepudin, E. A., Hikmatulaila, E. A., Agas, Ardiansyah, S., & Khotimah, H. (2024). Analisis Rekontruksi Fungsi Manajemen Publik dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Banten. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 168 – 178. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1298>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

## Analisis Rekontruksi Fungsi Manajemen Publik dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Banten

Riska Amelia<sup>1\*</sup>, Eli Apud Saepudin<sup>2</sup>, Enong Ais Hikmatulaila<sup>3</sup>, Agas<sup>4</sup>, Syendy Ardiansyah<sup>5</sup>, Husnul Khotimah<sup>6</sup>

Prodi Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia<sup>123456</sup>

Email: [riskaamelia121226@gmail.com](mailto:riskaamelia121226@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id](mailto:eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id)<sup>2</sup>, [enongaishikmatulaila08@gmail.com](mailto:enongaishikmatulaila08@gmail.com)<sup>3</sup>, [agmaulana13@gmail.com](mailto:agmaulana13@gmail.com)<sup>4</sup>, [aasyendyendi@gmail.com](mailto:aasyendyendi@gmail.com)<sup>5</sup>, [husnulrama22@gmail.com](mailto:husnulrama22@gmail.com)<sup>6</sup>

Diterima: 29-03-2024

| Disetujui: 30-03-2024

| Diterbitkan: 31-03-2024

### ABSTRACT

*Regional development in Banten Province is affected by various factors, including the low quality of infrastructure, high poverty, and focus on optimal utilization of natural resources. One of the reasons is the lack of emphasis of management functions on efficient government service delivery in regional development. This analysis aims to restructure the role of the public sector in regional development in Banten Province to make it more effective and efficient. This analysis uses qualitative techniques and data collection through scientific research, interviews, and observations. The results of the analysis reveal that government functions for regional development in Banten Province must continue to be optimized. Improved follow-up on results. The analysis results show that there are several weaknesses in public management functions in Banten Province, including: Planning: Lack of community participation in the planning process, Planning is not yet data-based and evidence-based, Coordination between sectors and stakeholders is still weak, Government organizational structure is not optimal and there are overlapping authorities, The capacity of the state civil apparatus (ASN) still needs to be improved, ASN performance is not optimal.*  
**Keywords:** Public Management, Regional Development, Banten Province, Reconstruction, Effectiveness, Efficiency

### ABSTRAK

*Pembangunan daerah di Provinsi Banten dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kualitas infrastruktur, tingginya kemiskinan, dan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang optimal. Salah satu alasannya adalah penekanan kurangnya fungsi manajemen pada pemberian layanan pemerintah yang efisien dalam pembangunan daerah. Analisis ini bertujuan untuk merestrukturisasi peran sektor publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten agar lebih efektif dan efisien. Analisis ini menggunakan teknik kualitatif dan pengumpulan data melalui penelitian ilmiah, wawancara, dan observasi. Hasil analisis mengungkapkan bahwa fungsi pemerintah untuk pembangunan daerah di Provinsi Banten harus terus dioptimalkan. Peningkatan tindak lanjut pada hasil. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam fungsi manajemen publik di Provinsi Banten, antara lain: Perencanaan: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, Perencanaan belum berbasis data dan bukti-bukti (evidence-based), Koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan masih lemah, Struktur organisasi pemerintahan belum optimal dan terdapat tumpang tindih kewenangan, Kapasitas aparatur sipil negara (ASN) masih perlu ditingkatkan, Kinerja ASN belum optimal.*

**Katakunci:** *Manajemen Publik, Pembangunan Daerah, Provinsi Banten, Rekonstruksi, Efektivitas, Efisiensi.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Upaya ini melibatkan berbagai sektor, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat. Salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah efektivitas dan efisiensi manajemen publik. Manajemen publik adalah proses pengelolaan sumber daya dan aset publik untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Fungsi utama manajemen publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Analisis rekonstruksi fungsi manajemen publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten merupakan langkah penting dalam memahami tantangan, potensi, dan perubahan yang terjadi dalam konteks pemerintahan daerah tersebut. Provinsi Banten, sebagai bagian integral dari Indonesia, memiliki karakteristik unik, tantangan tersendiri, dan kebutuhan pembangunan yang perlu dipahami secara mendalam. Pembangunan daerah di Provinsi Banten memerlukan pendekatan manajemen publik yang efektif dan efisien untuk mengatasi berbagai masalah dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, rekonstruksi fungsi manajemen publik mempertimbangkan beberapa aspek kunci, antara lain: Tantangan Pembangunan: Identifikasi tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Banten, baik itu terkait dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau lingkungan. Analisis ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal. Peran Pemerintah Daerah: Menilai peran pemerintah daerah dalam pembangunan Provinsi Banten, termasuk kebijakan, regulasi, dan program-program yang telah diterapkan. Hal ini meliputi evaluasi terhadap kinerja lembaga pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan mendukung pembangunan. Partisipasi Masyarakat: Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena mereka merupakan pemangku kepentingan utama dan sumber daya yang harus dimobilisasi untuk mencapai tujuan pembangunan. Inovasi dalam Manajemen Publik: Mendiskusikan inovasi dalam manajemen publik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini termasuk penerapan teknologi informasi, pembangunan kapasitas, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemitraan dan Kolaborasi: Menganalisis kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi lintas sektor menjadi penting untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dan menciptakan sinergi dalam upaya pembangunan.

Melalui pendekatan analisis rekonstruksi fungsi manajemen publik, diharapkan dapat diidentifikasi potensi perbaikan dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Banten. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal dan tantangan yang dihadapi, langkah-langkah strategis dapat dirumuskan untuk meningkatkan kinerja manajemen publik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten, memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal. Dalam konteks ini, manajemen publik memegang peran kunci dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun, seperti halnya dengan banyak daerah di Indonesia, Provinsi Banten juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan rekonstruksi fungsi manajemen publik. Pendahuluan jurnal ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam tentang rekonstruksi fungsi manajemen publik dalam konteks pembangunan daerah di Provinsi Banten. Melalui pendekatan ini, kami berusaha memahami tantangan yang dihadapi, mengidentifikasi potensi yang dapat dimanfaatkan, dan mengeksplorasi dinamika perubahan yang terjadi dalam manajemen

publik di wilayah ini. Pertama-tama, kami akan menguraikan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Banten. Hal ini termasuk masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan daerah. Analisis ini akan memberikan landasan untuk memahami urgensi rekonstruksi fungsi manajemen publik.

Selanjutnya, kami akan mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam pembangunan Provinsi Banten. Ini mencakup kebijakan, regulasi, dan program-program yang telah diterapkan serta kinerja lembaga pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan mendukung pembangunan. Kemudian, kami akan membahas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam menjaga keterlibatan aktif mereka sebagai pemangku kepentingan utama dalam pembangunan. Selanjutnya, kami akan menyoroti inovasi dalam manajemen publik yang dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah di Provinsi Banten. Ini melibatkan penerapan teknologi informasi, pembangunan kapasitas, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Terakhir, kami akan mengeksplorasi kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah di Provinsi Banten. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dan menciptakan sinergi dalam upaya pembangunan. Melalui analisis ini, diharapkan akan tergambar gambaran yang komprehensif tentang tantangan, potensi, dan perubahan kontekstual dalam rekonstruksi fungsi manajemen publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten. Selain itu, langkah-langkah strategis dapat dirumuskan untuk meningkatkan kinerja manajemen publik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

Kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn dengan enam variabel yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 antara lain: (1) Tidak adanya lampiran mengenai standarisasi data kebutuhan pemerintahan daerah; (2) adanya ego sektoral Kemendagri yang terburu-buru menerbitkan aturan dan aplikasi; (3) belum terujinya keandalan aplikasi baik secara struktur, isi, dan ketersediaan jaringan. (No Title, n.d.)

Kebijakan adalah sebuah payung hukum untuk melaksanakan segala sesuatu, seperti kebijakan penanggulangan bencana adalah merupakan payung hukum untuk melakukan kerja-kerja penanggulangan bencana. Dalam kegiatan penanggulangan bencana tidak bisa di pisahkan dari kebijakan lainnya., seperti kebijakan sistem perencanaan pembangunan, kebijakan tentang pengelolaan keuangan. Kebijakan tentang organisasi perangkat daerah dan lain sebagainya. Belum adanya sinergitas antar kebijakan satu dengan kebijakan lainnya menjadi salah satu kendala bagi pemerintah daerah pada khususnya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini sudah banyak di rasakan oleh beberapa aparatur pemerintah daerah yang memahami tentang kebijakan, sehingga mereka harus hati-hati untuk bertindak. Salah satu contoh kehati-hatian pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah dalam pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana, selanjutnya analisa data di lakukan secara descritif dengan harapan menggambarkan secara jelas dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah urusan kebencanaan belum menjadi salah satu urusan wajib maupun urusan pilihan, sedangkan dalam kebijakan penanggulangan bencana pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyedikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai.(Rizki, 2023)

Partai sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus dalam bidang politik dan mereka punya visi misi tertentu untuk mewujudkannya melalui peran anggota-anggota partainya. Politisi perempuan beranggapan bahwa partai politik adalah organisasi yang memiliki tujuan khusus dalam bidang politik dan mereka punya visi misi tertentu untuk mewujudkannya melalui anggota-anggotanya. Berdasarkan hasil olahan data secara fenomenologis diperoleh kesimpulan bahwa politisi perempuan tertarik masuk dalam partai politik cenderung mendasari pada empat alasan, yaitu: (1) reformasi sistem pengorganisasi partai; (2) aktualisasi diri yang representatif kaum perempuan; (3) keberdayaan sebagai politisi perempuan; dan (4) memberi warna atas praktik politik dan urusan publik. (Nurrohman et al., 2023)

Pada tahap tanggap darurat dilakukannya pelayanan informasi dengan tujuan memberikan tanggapan cepat sebagai saluran informasi interaktif bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi terkait krisis kepariwisataan yaitu; pemangku kepentingan, masyarakat dan media (Suwanda, dan Widjaja, 2020:8). Tim komunikasi khusus dan media center menjadi upaya yang dilakukan oleh tim khusus satgas penanggulangan bencana PT. Banten West Java Tourism Development untuk dapat terus meng-update perkembangan kawasan wisata Tanjung Lesung kepada publik melalui media sosial Instagram miliknya di @tanjunglesung.id. Respon cepat dalam menanggapi gejala krisis yang terjadi yang dilakukan oleh satgas penanggulangan bencana PT. Banten West Java Tourism Development dalam menyampaikan informasi kepada publiknya dirasakan oleh Syifa Fauziyah sebagai masyarakat sekaligus pengunjung kawasan wisata Tanjung Lesung. Teknologi komunikasi dapat digunakan untuk mengelola krisis, dalam hal ini, media sosial dapat digunakan sebagai media informasi untuk meringankan krisis dengan menyampaikan berita yang tepat, sehingga public dapat mengetahui informasi yang benar. (Nurfauzi, 2021)

Bantuan Sosial merupakan salah satu bentuk konsekuensi logis atas kebijakan negara tentang pemenuhan hak dasar (Rumah layak huni dan wilayah yang diperuntukkan sebagai lokasi hunian yang aman) bagi setiap warga negara. Tujuan penyelenggaraan bantuan sosial prinsipnya adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial. Secara yuridis, Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN dapat disalurkan kepada masyarakat baik dalam bentuk uang tunai (cash transfer) maupun barang. Dalam kerangka implementasi kebijakan tentang Bantuan Sosial untuk perbaikan perumahan, terdapat beberapa lembaga pemerintah yang mempunyai mekanisme penyaluran sampai di tingkat masyarakat. Secara eksplisit, Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah telah dituangkan dalam ketentuan hukum (Keputusan Menteri Sosial) yang diberikan secara khusus kepada korban bencana dan memberikan peluang untuk Relokasi. BSBBR yang dibiayai dengan APBN dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pemerintah daerah terutama untuk program relokasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah Rawan bencana. (Bsbbr et al., n.d.)

Kearifan atau wisdom merupakan suatu pemahaman kolektif, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang mempengaruhi keputusan penyelesaian atau penang- gulangan suatu masalah kehidupan. Kearifan dalam hal ini merupakan perwujudan seperangkat pemahaman dan pengetahuan yang mengalami proses perkembangan oleh suatu kelompok masyarakat setempat atau komunitas yang terhimpun dari proses dan pengalaman panjang dalam berinteraksi dalam satu sistem dan dalam satu ikatan hubungan yang saling menguntungkan. (Setyawati et al., n.d.)

Degradasi lahan adalah suatu proses yang menjelaskan fenomena penurunan kapasitas tanah pada saat sekarang atau saat yang akan datang. Dalam mendukung kehidupan manusia yang dipengaruhi aktifitas manusia, selain berakibat pada ekologi, degradasi lahan dapat berakibat pada penurunan produksi tanaman yang juga berpengaruh pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk menganalisis kondisi degradasi

lahan di wilayah masing-masing dapat dengan menggunakan data produktivitas tahunan tanaman yang paling dominan, sedimentasi, bencana longsor dan banjir.(Sanjaya et al., 2023)

Promosi adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pasar sasaran dari badan usaha agar konsumen mengetahui produknya dan siap untuk membeli atau menerima produk produk yang disediakan oleh perusahaan. Promosi adalah kegiatan komunikasi antara penjual dan pembeli untuk mengubah sikap dan perilaku pembeli agar menjadi pembeli dan mengingat produk tersebut.(Nurjanah et al., 2023)

Megaswara FM radio merupakan salah satu radio di Serang, Banten. Menjadi salah satu media penyiaran yang banyak di gemari oleh warga Serang pada era tahun 2000 an, tapi Megaswara FM tidak pernah berhenti untuk menyiarkan topik-topik terhangat yang ada di khalayak umum. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan data terkait mengenai strategi dari manajemen penyiaran kemudian menjawab tantangan Megaswara FM radio di masa pandemi saat ini. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Penelitian ini menemukan hasil bahwa manajemen media penyiaran Megaswara FM adalah berfokus pada meningkatkan kualitas penyiar mereka dan mengupdate berita mereka lebih terkini agar pendengar tidak bosan.(Risnandar et al., 2023)

Kawasan Banten Lama dan Pelabuhan Karangantu terletak di Kecamatan Kasemen, Kota Serang dan merupakan bekas peninggalan Kesultanan Banten di Pulau Jawa. Dahulu Kawasan ini menjadi pusat peradaban dan perdagangan internasional di Pulau Jawa. Kawasan Banten Lama sendiri saat ini menjadi daya tarik wisata utama di Kota Serang dengan adanya Masjid Agung Banten yang menjadi destinasi Wisata Religi di Kota Serang. Bahkan pada tahun 2017, jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Masjid Agung Banten mencapai 1,7 Juta orang. Berbeda nasibnya dengan Kawasan Pelabuhan Karangantu yang saat ini tidak berkembang sepesat Banten Lama. Padahal Pelabuhan Karangantu sendiri memiliki potensi wisata bahari dengan hasil alamnya dan akses ke objek wisata bahari di sekitarnya. Walaupun adanya keterkaitan sejarah antara Banten Lama dan Pelabuhan karangantu namun saat ini terjadi ketimpangan perkembangan antar kedua objek ini, dimana daerah Banten Lama jauh lebih berkembang daripada Pelabuhan Karangantu.(Pradani et al., 2020)

Bencana alam merupakan fenomena alam yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan rusaknya pembangunan yang telah dibangun selama ini. Kota Cilegon di juluki sebagai daerah kawasan industri yang rawan terhadap bencana, salah satunya adalah kegagalan teknologi yang menjadi ancaman yang paling mengancam masyarakat kota cilegon. Daerah ini mempunyai potensi bencana alam yang kompleks. Tak hanya ancaman kegagalan teknologi setiap tahunnya, kota industri ini juga rawan terhadap bencana banjir, tsunami, gempa dan industri. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilegon setiap tahunnya, ancaman kegagalan teknologi menduduki peringkat pertama.(Purnama et al., 2023)

Disiplin keilmuan Ushuluddin dan Dakwah adalah ilmu-ilmu pokok dalam studi keislaman, maka penguasaan terhadap sumber-sumber disiplin ilmu tersebut menjadi kebutuhan mutlak. Karena itu diperlukan adanya mata-mata kuliah tertentu yang langsung membahas buku-buku induk (pokok) disiplin ilmu tersebut, seperti karya-karya Ibnu Rusyd atau al-Ghazali untuk jurusan AF, Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an untuk jurusan TH, tidak hanya sekedar menjadi bahan rujukan dalam pembuatan silabus yang pada faktanya tidak pernah disentuh baik oleh dosen maupun mahasiswa.(Dakwah et al., 2014)

Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan mengurangi, menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Mitigasi Bencana tidak terlepas dari upaya manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan baik secara teknis, manusia maupun administrasi. (Di et al., n.d.)

Sesungguhnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan (Mansour Fakih, 2008: 12). Ketidaksetaraan gender juga disebabkan oleh adanya sikap bias gender yang didasarkan pengetahuan-pengetahuan masyarakat yang memiliki kecenderungan bersifat tidak adil gender. Kultur sosial budaya yang ada menempatkan perempuan pada kelas kedua, perempuan lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Budaya hegemoni patriarkhi menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, organisasi, maupun politik, sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah. Kurangnya kesempatan yang dimiliki perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan atau bahkan menjadi pemimpin dari suatu organisasi, membuat perempuan lebih memilih bersikap pasif. Perbedaan ini terus berlangsung hingga mengarah pada diskriminasi yang merugikan perempuan, ketidakadilan perlakuan berupa marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban kerja berlebih. (Zohriah, n.d.)

Implementasi kebijakan layanan psikososial; di Kabupaten Pandeglang masih kurang memadai karena belum adanya peraturan berupa Peraturan Daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan psikososial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut peneliti memberikan saran agar penyelenggaraan layanan psikososial lebih terarah dan terukur dengan menjadikan peraturan daerah sebagai pedoman penyelenggaraan layanan psikososial secara sistematis, hal ini perlu menjadi prioritas utama yang harus dikaji mengingat pelaksanaan kebijakan terhadap kondisi wilayah Kabupaten Pandeglang. (Jumiati et al., 2022)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena rekonstruksi fungsi manajemen publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten.

### Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi: Dilakukan untuk mengamati secara langsung proses rekonstruksi fungsi manajemen publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten.
2. Analisis dokumen: Dilakukan untuk menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan rekonstruksi fungsi manajemen publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten, seperti peraturan daerah, kebijakan publik, dan laporan kegiatan.

### Teknik Analisis Data

1. Analisis data kualitatif: Dilakukan dengan cara mengkategorikan, menafsirkan, dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
2. Analisis Miles dan Huberman: Digunakan untuk menganalisis data kualitatif dengan tahapan: (1) reduksi data, (2) display data, (3) verifikasi data, dan (4) penarikan kesimpulan.

#### Kerangka Analisis

1. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
2. Teori rekonstruksi: Digunakan untuk memahami proses rekonstruksi fungsi manajemen publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten.
3. Teori manajemen publik: Digunakan untuk menganalisis fungsi-fungsi manajemen publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten.
4. Teori pembangunan daerah: Digunakan untuk memahami konteks pembangunan daerah di Provinsi Banten.

#### Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang rekonstruksi fungsi manajemen publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas fungsi manajemen publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pembangunan: Infrastruktur: Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur, masih terdapat kekurangan dalam jaringan transportasi, air bersih, dan sanitasi di beberapa wilayah Provinsi Banten. Tantangan Pembangunan: Pendidikan: Masih ada tantangan terkait akses pendidikan berkualitas dan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kesehatan: Akses layanan kesehatan yang merata dan ketersediaan fasilitas kesehatan masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil. Ekonomi: Perlu adanya diversifikasi ekonomi dan peningkatan lapangan kerja, khususnya untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lingkungan: Provinsi Banten dihadapkan pada masalah pengelolaan lingkungan yang baik, terutama terkait dengan pengelolaan sampah dan konservasi sumber daya alam. Peran Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi tantangan pembangunan, baik melalui penyusunan kebijakan, alokasi anggaran, maupun penyelenggaraan layanan publik. Evaluasi terhadap kinerja lembaga pemerintah daerah menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan, pemantauan program-program pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Inovasi dalam Manajemen Publik: Penerapan teknologi informasi, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan aplikasi berbasis mobile, dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan pelayanan publik. Pembangunan kapasitas pegawai pemerintah daerah dalam manajemen dan kepemimpinan perlu menjadi prioritas untuk menghadapi perubahan yang terus-menerus dalam lingkungan pembangunan. Kemitraan dan Kolaborasi: Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dapat meningkatkan akses sumber daya dan expertise dalam pembangunan daerah. Pengembangan kemitraan strategis dengan pihak swasta dalam proyek-proyek infrastruktur dan pengelolaan lingkungan dapat memberikan solusi inovatif dan berkelanjutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rekonstruksi fungsi manajemen publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Peran pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan utama harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan

kemitraan yang kuat dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas manajemen publik perlu diperkuat melalui penerapan inovasi teknologi dan pembangunan kapasitas pegawai. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks. Pembahasan ini juga menekankan pentingnya pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan yang memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan sosial. Dengan demikian, rekonstruksi fungsi manajemen publik di Provinsi Banten dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

## KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa rekonstruksi fungsi manajemen publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Peran pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan utama harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan yang kuat dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas manajemen publik perlu diperkuat melalui penerapan inovasi teknologi dan pembangunan kapasitas pegawai. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks. Pembahasan ini juga menekankan pentingnya pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan yang memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan sosial. Dengan demikian, rekonstruksi fungsi manajemen publik di Provinsi Banten dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rekonstruksi fungsi manajemen publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten telah menunjukkan beberapa hasil positif, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pembangunan daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pembangunan daerah
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
4. Namun demikian, masih terdapat beberapa yang perlu dibenahi, antara lain: Kesenjangan antar wilayah, Kapasitas aparatur yang masih perlu ditingkatkan, Koordinasi antar OPD yang masih perlu diperkuat

## DAFTAR PUSTAKA

- Bsbbr, K., Sosial, K., Sosial, P., Desa, K., & Rk, K. (n.d.). *Bantuan stimulan bahan bangunan rumah (bsbbr) dalam relokasi permukiman korban bencana alam 1 di desa cibeber-banten*. 4(1), 274–294.
- Jumiati, I. E., Agustino, L., Studi, P., Administrasi, M., Ilmu, F., Politik, I., Sultan, U., Tirtayasa, A., Raya, J., & Km, J. (2022). *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak*. 1.

- Nurfauzi, E. (2021). *Manajemen Krisis Satgas Penanggulangan Bencana PT . Banten*.  
<https://doi.org/10.36256/ijtl.v2i2.157>
- Nurjanah, D., Terapan, F. I., Telkom, U., Yusiana, R., Terapan, F. I., Telkom, U., Rizky, B., Belakang, A. L., & Indonesia, D. (2023). *Analisis Bauran Promosi Pada Sate Bandeng Rizky Tahun 2023*. 9(6), 2703–2709.
- Nurrohman, B., Ma, Y., Astuti, D. S., & Maharani, R. (2023). *Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik : Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten*. 4, 137–151.
- Pradani, R. A., Herlambang, S., Santoso, S., Banten, K., Karangantu, P., & Kasemen, K. (2020). *STUDI INTEGRASI WISATA RELIGIUS DAN WISATA BAHARI ( OBJEK STUDI : KAWASAN BANTEN LAMA DAN PELABUHAN KARANGANTU)* 2(2), 2743–2758.  
<https://doi.org/10.24912/stupa.v2i2.8951>
- Purnama, I. N., Hidayat, R. N., Putra, R. D., Shaleha, S. A., & Valentina, F. (2023). *Manajemen Bencana oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana Kegagalan Teknologi di Kota Cilegon*. 1(1), 145–152.
- Risnandar, R. R., Studi, P., Komunikasi, I., Yogyakarta, U. M., Azzahra, N. T., Studi, P., Komunikasi, I., Yogyakarta, U. M., Azzahra, A., Studi, P., Komunikasi, I., & Yogyakarta, U. M. (2023). *Manajemen Media Penyiaran Megaswara FM Serang dalam Menarik Pendengar di Era Pandemi*. 4(1), 1–11.
- Rizki, F. (2023). *PERENCANAAN ANGGARAN BPBD KAB . LEBAK*. 3, 25–36.
- Sanjaya, N., Hakim, A. L., Nugroho, A., Handoko, P., Mulyani, I., Studi, P., Administrasi, D., Universitas, P., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., Administrasi, I., & Indonesia, P. (2023). *EXIT STRATEGY PROGRAM FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASINS ( FMSRB ) BAGI KEMANDIRIAN PETANI KONSERVASI LAHAN DI KABUPATEN*. 12(1), 33–50.
- Setyawati, S., Respati, D., & Sumunar, S. (n.d.). *KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BADUY*